



WALIKOTA BUKITTINGGI

**PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 1436 / II-BKPSDM /2022**

**TENTANG
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 808 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Teknis dengan formasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

II. Kategori Pelamar :

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada JF Teknis Tahun Anggaran 2022 wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan JF yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
2. Pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka II.1 dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintah/Yayasan.
3. Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagaimana angka II.2 dibuat sesuai dengan format pada Lampiran III pengumuman ini.

III. Persyaratan Pelamar :

Pelamar seleksi PPPK JF Teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat Keterangan Sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan

- yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba;
- c. Huruf a dan b wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.
9. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (dilampirkan setelah dinyatakan lulus);
 10. Pelamar yang lulus PPPK JF Teknis dikontrak dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) maksimal selama 5 (lima) tahun;
 11. Pelamar JF Teknis yang mempunyai persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai dapat mempedomani **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022** tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
 12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
 13. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud angka III.12, diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi PPPK JF Teknis **kecuali** untuk Jabatan **Pemadam Kebakaran** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.

IV. Tata Cara Pelamaran :

Pelamar PPPK JF Teknis melakukan pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK.
2. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
3. Pelamar yang telah memiliki akun, melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
4. Pelamar mengisi data pada portal nasional.

5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
- a. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - b. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG;
 - c. Scan Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan;
 - d. Scan Sertifikat Kompetensi asli sebagai nilai tambahan (jika ada);
 - e. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli sesuai dengan ketentuan pada angka II. 3 pengumuman ini;
 - f. Scan Surat Lamaran asli untuk mengikuti seleksi PPPK JF Teknis ditujukan kepada Walikota Bukittinggi di Bukittinggi yang dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II pengumuman ini;
 - g. Scan Surat Pernyataan asli yang dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana Lampiran IV pengumuman ini.
 - h. Bagi pelamar **Penyandang Disabilitas**, selain persyaratan sebagaimana angka IV.5 huruf a s.d huruf g juga wajib melampirkan :
 - 1) Scan Dokumen/surat keterangan asli resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - i. Bagi pelamar jabatan **Pemadam Kebakaran**, selain persyaratan sebagaimana angka IV.5 huruf a s.d huruf g juga wajib melampirkan :
 - 1) Scan Surat Keterangan Sehat asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas; dan
 - 2) Scan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas.
 - j. Bagi pelamar jabatan **Pranata Pencarian dan Pertolongan**, selain persyaratan sebagaimana angka IV.5 huruf a s.d huruf h juga wajib melampirkan Scan Sertifikat Kompetensi Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi *underwater* (selam) asli;
 - k. Bagi pelamar jabatan **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**, selain persyaratan sebagaimana angka IV.5 huruf a s.d huruf h juga wajib melampirkan Scan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level 1 asli.

V. Ketentuan seleksi :

Seleksi PPPK pada JF Teknis Tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) tahap :

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi.

VI. Jadwal Seleksi :

Seleksi PPPK untuk JF Teknis dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian Daftar Riwayat Hidup NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

* Jadwal dapat berubah sesuai dengan ketentuan Panselnas

VII. Pengumuman Hasil Seleksi :

Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bukittinggikota.go.id>.

VIII. Ketentuan Lain-lain :

1. Pelamar **diwajibkan** membaca, memahami dan mempedomani dasar hukum sebagaimana tertuang pada angka I dan semua ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini;
2. Kelalaian pelamar dalam menggunggah dokumen sesuai persyaratan pada pengumuman ini, menjadi tanggung jawab pelamar;
3. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022 dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2022;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil seleksi/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digururkan kelulusannya;
6. Informasi resmi serta perubahan jadwal dan hal-hal lainnya yang terkait dengan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022

hanya dapat dilihat dalam laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bukittinggikota.go.id>;

7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka VIII.6 untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian serta pengumuman penting lainnya;
8. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat menghubungi *call center* di hari dan jam kerja dengan nomor : **082164910208** (*hanya via chat wa dan tidak melayani via telpon*).

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Bukittinggi, 20 Desember 2022



LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 810 / 1436 / 11- B/WPSDM / 2022
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
 TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
 TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN 2022

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	S-1/D-IV PARIWISATA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ANIMASI / S-1 SENI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 KOMUNIKASI / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 ARSITEKTUR / S-1 DESAIN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA BADAN KEUANGAN, SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KESEHATAN
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN KEARSIPAN	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN ORGANISASI
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13.	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	5	9	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
14.	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
15.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 PLANOLOGI / D-IV PLANOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / S-1/D-IV ARSITEKTUR / S-1 MANAJEMEN / S-1 GEOGRAFI / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 STATISTIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	5	4	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
16.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, KEPALA BIDANG PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
17.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN	5	3	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
18.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK / S-1 ILMU ALAM (SAINS)	5	10	WALIKOTA BUKITTINGGI, SEKRETARIS DAERAH
19.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 MATEMATIKA / S-1 IPA / S-1 ILMU KESEHATAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1	5	4	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA BIDANG

		ILMU SOSIAL / S-1 ILMU HUMANIORA			PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP
20.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PENDIDIKAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PERTANIAN / S-1 KOMUNIKASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, CAMAT MKS
21.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PENDIDIKAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PERTANIAN / S-1 KOMUNIKASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, CAMAT GUGUK PANJANG
22.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PENDIDIKAN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PERTANIAN / S-1 KOMUNIKASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, CAMAT ABTB
23.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 EKOLOGI MANUSIA / S-1 BOKIMIA / S-1 FISILOGI REPRODUK TANAMAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP
24.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PERENCANA
25.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KESEHATAN
26.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
27.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
28.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
29.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
30.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
31.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
32.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU ALAM	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER PROGRAMMER	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

		/ S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA			
34.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER PROGRAMMER / S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
35.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER PROGRAMMER / S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
36.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER PROGRAMMER / S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
37.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER PROGRAMMER / S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
38.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER PROGRAMMER / S-1 KOMPUTER JURUSAN SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA	5	3	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA BADAN KEUANGAN, KEPALA BIDANG PENDAPATAN
39.	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH KOTA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK MESIN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI
40.	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL BANGUNAN	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, KEPALA BIDANG TATA RUANG
41.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMU / SMA / STM / SMK / MAN	5	25	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KEBAKARAN
42.	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA SEDERAJAT	5	12	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
43.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN UMUM

44.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
45.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA BADAN KEUANGAN, SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
46.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
47.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
48.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
49.	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER / D-III KOMPUTER TEKNIK / D-III INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
50.	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D-III MATEMATIKA / D-III ILMU PENGETAHUAN ALAM / D-III ILMU PENGETAHUAN SOSIAL / D-III ILMU KESEHATAN / D-III ILMU EKONOMI / D-III ILMU SOSIAL	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP
51.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
52.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
53.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
55.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
56.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
57.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN	5	5	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI			
58.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/ D-III KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	5	1	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
59.	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III KEPEGAWAIAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D- III TEKNIK KOMPUTER / D- III PEMERINTAHAN	5	2	WALIKOTA BUKITTINGGI, KEPALA BADAN KEUANGAN, SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
TOTAL					138 (Seratus Tiga Puluh Delapan)



 WALIKOTA BUKITTINGGI,
 ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 810/ 1436 / 11- B/PSVM/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2022

CONTOH SURAT LAMARAN

Perihal : Permohonan untuk menjadi
PPPK JF Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun 2022

Bukittinggi, Desember 2022
Kepada :
Yth. Bapak Walikota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat Lengkap :
No. Telp/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diterima menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Teknis pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Ijazah asli;
2. Scan Transkrip Nilai asli;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
4. Scan Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli;
5. Scan Sertifikat Kompetensi asli sebagai nilai tambahan (jika ada);
6. Scan Surat Keterangan Dokter asli yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (bagi formasi disabilitas);
7. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas (bagi penyandang disabilitas);
8. Scan Surat Keterangan Sehat asli (bagi pelamar Jabatan Pemadam Kebakaran);
9. Scan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas asli (bagi pelamar Jabatan Pemadam Kebakaran);
10. Scan Sertifikat Kompetensi Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi *underwater* (selam) asli (bagi pelamar Jabatan Pranata Pencairan dan Pertolongan);
11. Scan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level 1 asli (bagi pelamar Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)
12. Pas foto warna belatar belakang merah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

HORMAT SAYA,

Meterai
Rp. 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 810 / 1436 / 11- BKPSDM / 2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2022

CONTOH SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

>>> KOP SURAT <<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP : (diisi bagi Instansi Pemerintah)
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai (*isikan jabatan/pekerjaan*) selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2022
(.....JABATAN.....)

Stempel
Instansi /
Unit Kerja

(ttd)

NAMA PEJABAT

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 810 / 1436 / 11- B/KP/PM / 2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10.000,-